

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh pemilihan alternatif kebijakan PPh pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang di bagian pajak dan asuransi pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia serta didukung oleh data-data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif keempat dalam hal alternatif kebijakan PPh pasal 21 dengan cara di *gross up* merupakan metode yang paling menguntungkan, karena perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sebagai unsur beban (*deductible expense*) dimana tunjangan tersebut merupakan penghasilan bagi karyawan yang dikenakan PPh Pasal 21.

Pemilihan alternatif kebijakan PPh pasal 21 tersebut sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya laba perusahaan yang dikenakan pajak, pajak penghasilan terutang, dan *take home pay* (gaji yang dibawa pulang). Perusahaan selama ini menerapkan alternatif pertama yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan/pemberi kerja, dimana perusahaan akan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang merupakan selisih terbesar. Jika perusahaan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, maka tingkat laba sebelum pajak akan lebih rendah dibandingkan ketiga alternatif lainnya, namun hal ini akan berdampak pada pajak penghasilan perusahaan menjadi lebih kecil dan perusahaan akan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang

tidak berbeda dengan alternatif kedua dan ketiga yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai dan ditunjang perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak. Ditinjau dari segi komersial, biaya fiskal yang besar dari kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* tersebut tampaknya seperti pemborosan, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang besar tersebut akan berdampak kepada laba sebelum pajaknya akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya pajak penghasilan terutang perusahaan juga akan menjadi lebih kecil.

Ditinjau dari sudut pandang pegawai/karyawan, dengan penerapan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, akan menghasilkan gaji yang dibawa pulang/*take home pay* yang paling besar. Jika dilihat dari jumlah PPh terutang dan selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial dari kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, maka alternatif kebijakan ini menguntungkan perusahaan karena jumlah PPh terutang lebih kecil dan perusahaan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang lebih kecil dari alternatif kedua yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dan tidak berbeda dengan alternatif kedua dan ketiga yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai dan ditunjang perusahaan/pemberi kerja.

Dengan demikian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan yang paling menguntungkan bagi perusahaan adalah adalah kebijakan PPh Pasal 21 dengan metode di *gross up* jika dikaitkan dengan pajak penghasilan terutang perusahaan dan selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap empat alternatif kebijakan PPh Pasal 21, disarankan agar PT. INTI (Persero) menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 dengan metode di *gross up*. Hal ini dikarenakan, kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* lebih menguntungkan dari pada kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan/pemberi kerja, yang selama ini diterapkan perusahaan.